



# Terbanyak Bantul, Paling Sedikit Kota

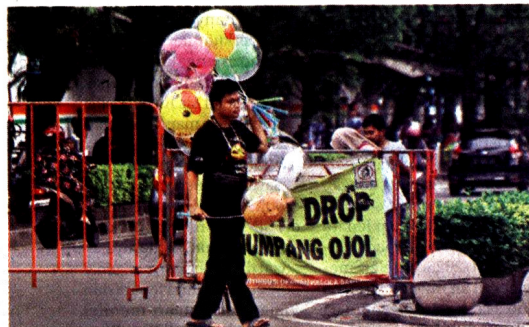
221.962 Warga Miskin  
Akan Terima Bantuan  
Rp 900 Ribu Akhir Tahun

**JOGJA** - Sebanyak 221.962 warga miskin di DIJ akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari pemerintah di akhir tahun ini. Setiap penerima

manfaat akan mendapatkan uang Rp 900 ribu.

"Perbulannya itu Rp 300 ribu, diserahkan mulai Oktober, November dan Desember tahun ini," ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIJ Endang Patmin-tarsih saat dikonfirmasi kemarin (17/11) ■

*Baca Terbanyak... Hal 7*



**SASARAN:** Warga penjual mainan anak-anak berkeliling menawarkan dagangannya di kawasan Malioboro, Jogja, kemarin (17/11). Sebanyak 221.962 warga miskin di DIJ akan menerima BLTS Rp 900 ribu dari pemerintah pusat akhir tahun ini.

# Terbanyak Bantul, Paling Sedikit Kota

Sambungan dari Hal 1

BLTS merupakan bentuk bantuan tambahan dari pemerintah bagi penerima manfaat

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beserta

pengembangannya. Bantuan tambahan itu hanya bersifat sementara.

"Kalau saya berbicara pengembangan, berarti ada yang menerima di luar PKH atau di luar BPNT, gitu ya," bebernya.

Dalam data yang diberikan, jumlah penerima BLTS terbanyak di Kabupaten Bantul yakni 65.346 penerima. Kemudian disusul Gunungkidul dengan jumlah penerima 55.191, Sleman 54.804, Kulon Progo 32.386 dan Kota Jogja 14.235 penerima.

"Diserahkan sekaligus, berarti penerima manfaat tambahan menerima Rp 900.000, pencairan lewat PT Pos dan Bank Himbara yang ditunjuk oleh Kementerian

Sosial," jelasnya.

Namun, Erdang, sapan akrahnya menegaskan seluruh bentuk Bansos dari pemerintah bersifat stimulan agar penerima manfaat terdapat dan suatu saat bisa berdaya tanpa mengharap bantuan pemerintah. Berbagai program restorasi sosial untuk membentuk mental masyarakat itu telah dilakukan.

"Mengubah perilaku, mindset masyarakat agar tidak bergantung pada bansos," bebernya.

Ia menilai, bansos tidak diberikan secara permanen. Masyarakat yang sudah se-

jahtera akan dicoret dan digantikan dengan masyarakat miskin lainnya yang memang berada dalam kondisi krisis ekonomi maupun sosial. "Jangan sampai punya pikiran, ah udalah, gini ajalah, nanti kan juga dibantu (pemerintah)," tandasnya.

Menurutnya, budaya malu harus benar-benar meresap dan dilakukan oleh para penerima manfaat. Malu masuk kategori keluarga miskin, malu karena malas dan sebagainya. Motivasi terus diberikan agar mereka mau berusaha untuk mengubah kehidupan perekonomiannya. (oso/lez/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005